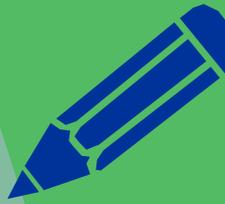


Book Chapter

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran**
Koperasi dalam Menghadapi
Industrial Era 4.0 and Society 5.0



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor

Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeuhi, Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

20 **Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0**

PENERBIT:



Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN)

Graha Bustanil Ariffin Jl. Raya Bandung - Sumedang KM 20,5 Jatinangor Sumedang

Telp: (022) 7794444 Fax: (022) 7796033

E-mail: lppm@ikopin.ac.id Website: www.ikopin.ac.id

Bunga Rampai 2020

Pemikiran Koperasi dalam Menghadapi *Industrial Era 4.0. and Society 5.0.*

ISBN : **978-602-70115-8-8**
Manajer Penerbitan dan Produksi : H. Nurhayat Indra, Ir., M.Sc.
Supervisor Editor : Dr. Ami Purnamawati, Dra., M.Si.
Dr. Hj. Yuanita Indriani, Ir., M.Si.
Dr. H. Ery Supriyadi R., Ir., MT.
Copy Editor : Hj. Rosti Setiawati, SE., M.Si.
Tata Letak @ Desain Sampul : Adang Cahya, Risvan Santoso

Hak Cipta @2020 Penerbit Ikopin

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor, Jl. Jatinangor KM. 20, 5, Cibeusi, Sumedang,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Telp: (022) 7794444

Fax: (022) 7796033

E-mail: sekrek@ikopin.ac.id

Website: www.ikopin.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk tidak terbatas pada mem-fotocopy, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Bunga Rampai atau *Book Chapter* - sebagai kumpulan karya tulis ilmiah yang memiliki topik permasalahan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang keilmuan - menjadi media bagi penulis yaitu para tenaga pendidik Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) untuk menuangkan pikiran, argumentasi atau hasil kajian dengan fokus perkoperasian. Selain media bagi para penulis, Bunga Rampai ini juga menjadi media yang dapat menambah khasanah pemikiran tentang perkoperasian dan sebagai bahan rujukan bagi para pihak yang menaruh minat dan praktisi perkoperasian.

Topik yang diusung pada terbitan Bunga Rampai edisi ini adalah Perkoperasian dalam menghadapi *Industrial Revolution Era 4.0 and Society 5.0*. Topik besar pada Bunga Rampai ini dibagi menjadi tiga fokus, yaitu Kelembagaan Koperasi, Strategi Membangun Koperasi, dan Pengembangan Koperasi, baik pada koperasi yang menerapkan sistem konvensional maupun yang menerapkan prinsip Syariah.

Secara konsep, koperasi ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati diri koperasi dalam setiap aktivitasnya, baik dalam aktivitas kelembagaan, pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya; topik-topik tersebut menjadi bahasan dan pemikiran para penulis mengenai Penilaian Kinerja Koperasi Berbasis Jati Diri. Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi merupakan elemen penting terutama dalam era industri 4.0 dan masyarakat 5.0 oleh karena itu peningkatan dan pemberdayaan SDM koperasi tidak dapat dinafikan. SDM Koperasi yang mumpuni akan dapat menangkap peluang, mengidentifikasi permasalahan serta mencari alternatif solusi dari berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi koperasi demikian halnya dengan tata pamong dan tata kelola koperasi yang sesuai dengan jatidirinya (*Good Cooperative Governance*). Hal lain adalah terobosan pemikiran pengembangan kebermanfaatan koperasi, salah satunya adalah koperasi sebagai inkubator bisnis dari usaha anggotanya

Kondisi koperasi di Indonesia secara faktual berdaya saing rendah; oleh karena itu diperlukan berbagai strategi yang bersifat komprehensif dan efektif, untuk mengubah keragaan koperasi menjadi lebih baik, baik dari aspek kinerja kelembagaan maupun usaha. Dengan demikian, persepsi masyarakat Indonesia terhadap koperasi akan berubah menjadi positif. Beberapa strategi yang dikaji adalah Revitalisasi Struktur Modal dan Organisasi, *Public Relations* dalam membangun citra positif serta adaptasi terhadap perubahan teknologi informasi yang tidak dapat dielakkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk koperasi. Digitalisasi koperasi dapat menjadi media efektif untuk melibatkan sekaligus *rebranding* koperasi bagi kaum milenial, termasuk mahasiswa untuk menjadi *agent of change* koperasi menuju koperasi modern. Pemikiran terhadap adaptasi koperasi pada era revolusi industri 4.0 dan digitalisasi koperasi serta layanan *on-line system* perusahaan koperasi tidak akan terlepas dari kerangka dan bingkai kebijakan yang harus dipatuhi.

Selain hukum yang mengatur layanan usaha koperasi dengan sistem *on-line* salah satu buah pikir yang dituangkan pada Bunga Rampai ini adalah adaptasi koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip agama Islam (Syariah) terhadap arus perubahan revolusi industry 4.0 pada aktivitas kelembagaan, keuangan dan usahanya.

Pemikiran-pemikiran yang dituangkan dalam *book chapter* atau bunga rampai ini diharapkan dapat mengisi ruang-ruang kosong pengembangan berbagai pemikiran pengembangan koperasi baik yang bersifat teoritis maupun praksis, dan diharapkan dapat mengisi kebutuhan referensi pengembangan pengetahuan dan konsep perkoperasian.

Pemikiran yang sifatnya terbuka ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami sangat menanti berbagai kritik dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Jatinangor, 27 Januari 2020

Tim Editor

ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN

**Dr. (HC). Burhanuddin Abdullah, MA.
Rektor Ikopin**

Prawacana

Buku "Bunga Rampai 2020", antlogi pemikiran koperasi "masa depan" ini sudah cukup lama ditunggu terutama oleh para peminat kehidupan berkoperasi. Mereka ingin tahu bagaimana pemikiran para dosen Institut Manajemen Koperasi Indonesia tentang koperasi di masa depan dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang fenomenal dalam beberapa tahun terakhir ini.

Terus terang, kita semua bahkan dunia sempat tertegun dengan adanya perkembangan TIK yang begitu pesat dan mengagumkan. Perusahaan-perusahaan kelas dunia yang sudah berumur panjang banyak yang berguguran dan terpaksa bubar. Mereka tak tahan lagi menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan baru yang kemunculannya bahkan seolah tak terpikirkan. "Uber" menjadi contoh klasik sebagai perusahaan transportasi terbesar di dunia padahal tidak satu pun memiliki kendaraan. "AirBnB" adalah penginapan alternatif terbesar di dunia tanpa memiliki 1 kamar tidur pun. Cukup memiliki aplikasi.

Di dalam negeri pun begitu. "Gojek" adalah contoh yang paling menonjol. Perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang telah melangkah lebih jauh, besar, dan lebih modern saja dibuat terkaget-kaget dengan adanya disrupsi teknologi. Apalagi koperasi yang kegiatannya serba kecil, lemah, dan terpinggirkan.

Perubahan yang cepat dan pesat ini kemudian disebut dengan revolusi industri 4.0 sebagai bagian dari perjalanan panjang evolusi industri sejak 1800-an. Ciri-cirinya adalah terciptanya interkoneksi antara manusia, mesin, dan alat komunikasi; transparansi informasi; dan pengambilan keputusan dapat dibuat cepat dan akurat. Keuntungan dari proses yang cepat tersebut tentu efisiensi dan produktivitas meningkat, biaya lebih murah, manajemen risiko yang lebih baik, identifikasi dan pemecahan masalah lebih cepat.

Revolusi industri tentu tidak berjalan dalam ruang hampa. Masyarakat yang melahirkan dan mewadahi perubahan yang cepat tersebut juga memiliki dinamika perubahan tersendiri. Dalam kaitan ini, Jepang memelopori dengan menyusun program yang disebut "society 5.0" yang bertujuan untuk memanfaatkan semua kemajuan untuk melayani kebutuhan manusia tanpa mendegradasi manusia itu sendiri. Program ini kelihatannya ingin menolong manusia agar tidak teralienasi oleh hasil karyanya sendiri. Manusia tetap menjadi subjek dan tujuan dari seluruh perkembangan dan kemajuan yang dibuatnya.

Bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam perjalanan koperasi Indonesia pun telah tumbuh kesadaran baru. Mereka sudah banyak yang menerjunkan diri dan menggeluti kegiatan koperasinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Kita perlu terus mengamati dan terlibat dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi karena kecepatan perubahannya yang demikian pesat. Dampak yang ditimbulkannya pun sungguh hebat. Ia menyentuh berbagai sendi kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan dan bahkan hubungan internasional.

Kesempatan semakin terbuka dengan cukup banyaknya rumah produksi aplikasi yang melirik potensi yang dimiliki koperasi. Disamping itu, banyak barang hasil produksi koperasi dan UMKM yang menjadi lebih terbuka pemasarannya setelah memanfaatkan E-commerce dan media sosial lainnya. Hal ini membuka kesempatan baru untuk menyongsong tumbuh dan berkembangnya koperasi masa depan bagi Indonesia yang lebih baik.

Menarik untuk dikemukakan, beberapa penulis dalam antologi ini mengedepankan pentingnya daya saing sebagai unsur utama untuk menjaga eksistensi dan kinerja koperasi. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan ini pada gilirannya akan melemahkan usaha koperasi. Sebaliknya, apabila koperasi mampu memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi maka kemungkinan akan banyak masyarakat yang bukan anggota koperasi berkeinginan menjadi anggota koperasi. Koperasi akan semakin besar dan kuat. Peran dan pangsanya dalam menopang ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan akan juga meningkat.

Pernyataan tersebut sekaligus juga mengisyaratkan bahwa koperasi memiliki kesamaan dengan entitas ekonomi lainnya seperti BUMN atau BUMS. Koperasi harus mampu bersaing di pasar. Bukan hanya di pasar domestic tetapi juga di pasar dunia. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi selama ini harus dimaknai sebagai upaya membantu agar koperasi mampu bersaing. Bukan untuk terus mendapat fasilitas dan kemudahan.

Berbagai pandangan yang diajukan oleh para "guru koperasi" dalam antologi ini, didasari oleh pemahaman bahwa koperasi adalah "ideologi" dan cara masyarakat berkegiatan menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari di bidang ekonomi dan sosial yang memiliki dimensi jamak. Tentu, yang disampaikan dalam antologi ini belumlah mencakup keseluruhan dimensi koperasi masa depan. Sebut saja ini baru ontologi babak satu. Lanjutannya akan menyusul kemudian karena masih banyak yang harus dibahas dan dikemukakan.

Ada banyak aspek daya saing koperasi yang perlu diteliti, dibahas, dan dirumuskan pada sisi kebijakan dan pelaksanaannya. Memang, pembaca dapat mencermati bahwa aspek kelembagaan telah mendapat porsi pembahasan yang cukup. Sementara masalah permodalan dan pemanfaatan teknologi, sebagaimana judulnya, mendapat proporsi pembahasan yang lebih dominan. Derasnya desakan untuk segera memanfaatkan kemajuan ICT juga harus diartikan sebagai derasnya desakan untuk meningkatkan kualitas para pegiat koperasi. Sementara itu, aspek pengelolaan yang telah dibahas dengan cukup apik masih perlu tambahan bahasan tentang dinamika bisnis dan semangat inovasi.

Yang juga sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana mempersiapkan ekosistem sehingga koperasi menjadi entitas yang dinamis dan bukan hanya "survive" tetapi terutama dapat mensejahterakan para anggotanya serta turut mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, sebagaimana dikemukakan dalam *World economic Forum* tentang 12 pilar daya saing global, aspek pengelolaan makroekonomi, hubungan perdagangan, perkembangan pasar domestik, perubahan sosiologis para pelaku ekonomi, pendidikan demokrasi, termasuk sistem keuangan yang sejalan dengan perkembangan teknologi, pada gilirannya nanti perlu mendapat pembahasan secukupnya.

Perjalanan memang masih jauh. Tetapi, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, banyak hal yang bisa diharapkan akan dapat diselesaikan. Penyebaran informasi tentang tata cara dan tata kelola berkoperasi yang baik akan dapat dengan mudah disebarluaskan. Insya Allah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ANTOLOGI PEMIKIRAN KOPERASI MASA DEPAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN I	
KELEMBAGAAN KOPERASI	1
1. EKSPEKTASI DAN DISPUTASI KORPORASI KOPONTREN DI JAWA BARAT Ery Supriyadi Rustidja	3-16
2. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI UNTUK ERA INDUSTRI 4.0. DAN MASYARAKAT 5.0. Yeni Wipartini	17-25
3. MEMBANGUN <i>GOOD COOPERATIVE GOVERNANCE</i> UNTUK PERKOPERASIAN DI INDONESIA Heri Nugraha	27-36
4. PELUANG DAN TANTANGAN KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 Rosti Setiawati	37-44
5. REVITALISASI STRUKTUR MODAL DAN ORGANISASI KOPERASI DALAM MEMPERKUAT DAYA SAING KOPERASI DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN SOCIETY 5.0 Sir Kalifatullah Ermaya, Iwan Mulyana	45-55
6. PENILAIAN KINERJA KOPERASI BERBASIS JATIDIRI Endang Wahyuningsih	57-69
BAGIAN II	
STRATEGI PEMBANGUNAN KOPERASI	71
7. <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i> : ALTERNATIF MODEL PENGEMBANGAN BISNIS KOPERASI Sugiyanto	73-85
8. MAHASISWA SEBAGAI <i>AGENT CHANGE</i> TRANSFORMASI ADAPTASI KOPERASI DI ERA REVOLUSI 4.0. Yuanita Indriani	87-95
9. STRATEGI <i>PUBLIC RELATIONS</i> UNTUK KOPERASI INDONESIA Ami Purnamawati	97-109
10. PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0. Dandan Irawan	111-117

11.	<i>COMPETITIVE DIFFERENTIATION</i> KOPERASI DALAM ERA INDUSTRI 4.0 Gijanto Purbo Suseno	119-131
12.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM <i>ONLINE</i> DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI ERA DIGITALISASI Suarny Amran	133-140
13.	PENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI MELALUI INTEGRASI VERTIKAL Nurhayat Indra	141-150
14.	PERAN KOPERASI SEBAGAI INKUBATOR BISNIS BAGI BISNIS ANGGOTA Wawan Lulus Setiawan	151-159
15.	PEMANFAATAN FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM UPAYA MENEKAN FINANCIAL DISTRESS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM Rima Elya Dasuki	161-172
16.	URGENSI MARKETING 4.0. PADA KOPERASI Deddy Supriyadi	173-183
17.	MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS Dady Nurpadi	185-196
BAGIAN III		
KOPERASI SYARIAH.....		197
18.	MENAKAR URGENSI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA KOPERASI Nurjamil	199-210
19.	KOPERASI DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ANTARA HARAPAN DAN TANTANGANYA DI INDONESIA Abdul Hakim	211-220
20.	KAJIAN TENTANG PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI MELALUI KOPERASI SYARIAH Siti Nurhayati	221-228

MEMBANGUN KOPERASI PERTANIAN BERBASIS RANTAI NILAI AGRIBISNIS

Dady Nurpadi

Pendahuluan

Konsepsi pembangunan ekonomi esensinya merupakan proses dalam upaya meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat atau bangsa berdasarkan berbagai pendekatan yang bersifat multidimensional. Dimensi tersebut tidak saja menyangkut dimensi pengembangan aspek ekonomi, melainkan juga terintegrasi dengan berbagai dimensi aspek lainnya yang saling memengaruhi seperti dimensi sosial, budaya, teknologi maupun dimensi politik. Pembangunan koperasi saat ini merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut karena paling tidak perekonomian nasional diperankan oleh tiga pelaku utama, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi.

Landasan umum kebijakan pembangunan nasional untuk ketiga pelaku ekonomi di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Pada saat ini arah pembangunan yang dilaksanakannya berdasarkan pada Trisakti dengan sembilan butir Nawa Cita pembangunan ekonomi. Adapun rumusan arah kebijakan pembangunan yang terdapat dalam Trisakti adalah 1. Berdaulat dalam bidang politik, 2. Berdikari dalam bidang ekonomi, dan 3. Berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Sebagai bagian integral dari proses pembangunan ekonomi nasional, pembangunan koperasi yang saat ini dilakukan sejalan dengan butir ke enam dan ketujuh dalam konsep sembilan butir Nawa Cita pembangunan Indonesia. Pada butir ke enam Nawa Cita menekankan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Sedangkan butir ketujuh nawa cita diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

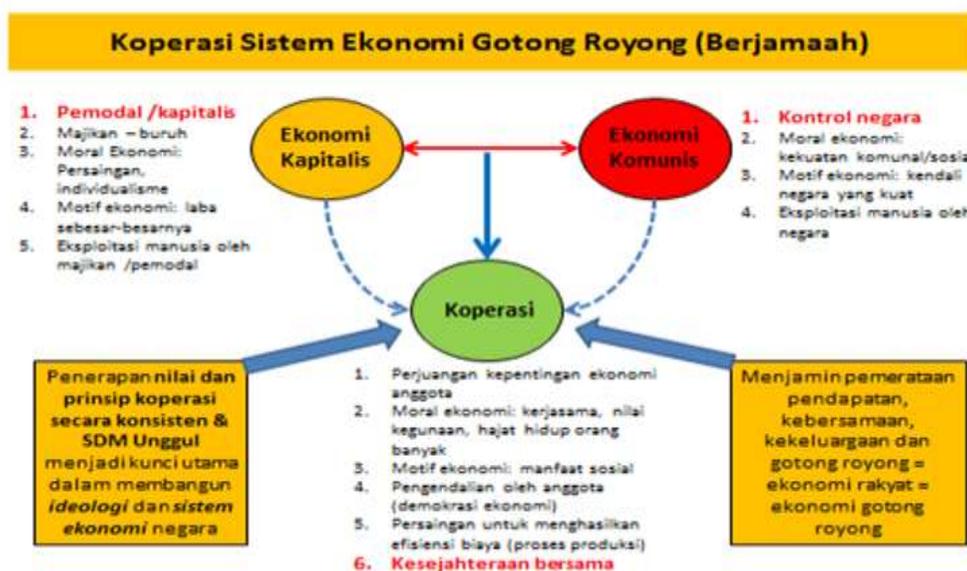
Tujuan dan Jati Diri Koperasi

Menurut UU RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab II Pasal 3, “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Atas dasar itu pula koperasi di definisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi akan terlaksana dengan baik apabila pengelolaan koperasi didasarkan pada prinsip jati diri koperasi dan berkemampuan daya saing sebagaimana direkomendasikan oleh ICA ROAP pada Konferensi Menteri-menteri Koperasi AsiaPasifik di Kathmandu bulan April 2002. Prinsip dalam jati diri koperasi merupakan

esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dari badan usaha lainnya. Kemampuan daya saing mempunyai makna bahwa koperasi harus dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain, otonomi, swadaya, berkehendak untuk mengelola diri sendiri sehingga mampu beroperasi dan berhasil bersaing dalam ekonomi pasar. Dengan prinsip jatidiri koperasi dan daya saing, koperasi akan berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan. Koperasi sebagai lembaga gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, maka dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten dan penguatan daya saing koperasi, maka pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya dapat diwujudkan.

Berikut digambarkan bagaimana sistem ekonomi gotong royong dalam koperasi:



Gambar 1. Koperasi Sistem Ekonomi Gotong Royong
 Sumber: Nurdin Halid, 2017 Dekopin

Pembangunan Koperasi Pertanian

A. Arti Penting Pembangunan Koperasi Pertanian

Peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terutama sebagai penghasil pangan baik hewani seperti daging, ikan dan telur; maupun pangan nabati seperti sayuran, buah-buahan, dan berbagai produk pertanian lainnya. Permintaan produk pertanian ini terus meningkat sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat. Peran penting produk pertanian sampai saat ini tidak pernah tergantikan oleh sektor lain, karena sektor inilah yang dapat menghasilkan pangan.

Selain penghasil pangan, sektor pertanian juga memberikan lapangan kerja yang cukup luas bagi masyarakat baik petani, buruh tani, nelayan, penyedia sarana produksi dan alat-alat atau mesin pertanian, pemasar dan pemroses hasil pertanian.

Dalam kegiatan bisnis pertanian, sektor pertanian selain penyedia bahan pangan utama, juga sebagai penyedia bahan baku bagi agroindustri yang banyak variasinya dalam menopang perekonomian nasional. Selain itu, untuk banyak komoditi pertanian terutama hasil perkebunan seperti teh, karet, kelapa sawit dan rempah-rempah, sektor pertanian juga berperan sebagai penghasil devisa dalam memenuhi permintaan luar negeri baik berupa bahan mentah, setengah jadi maupun produk jadi.

B. Syarat Mutlak dan Syarat Pelancar dalam Pembangunan Pertanian

Pembangunan ekonomi termasuk bidang pertanian memerlukan perangkat kelembagaan agar prosesnya mengarah pada sasaran yang telah ditetapkan. Kelembagaan ekonomi masyarakat terutama di pedesaan diperankan baik oleh koperasi pertanian maupun juga koperasi unit desa (KUD). Dalam pembangunan pertanian, menurut Mosher (1965) dalam bukunya *Getting Agricultural Moving*, pembangunan pertanian memerlukan syarat mutlak dan syarat pelancar. Terdapat lima syarat mutlak pembangunan pertanian, yaitu (1) pasar hasil pertanian, (2) teknologi yang senantiasa berubah, (3) tersedianya sarana produksi mesin dan peralatan pertanian, (4) insentif produksi bagi petani, dan (5) transportasi. Kelima syarat tersebut harus terpenuhi agar proses pembangunan pertanian terjadi dan mencapai sasaran. Apabila tidak terpenuhi, berakibat pada tidak berlangsungnya proses pembangunan pertanian.

Syarat pelancar untuk menguatkan syarat mutlak dalam proses pembangunan pertanian adalah : (1) pendidikan pembangunan, (2) kredit pertanian, (3) kegiatan petani dalam kelompok, (4) perbaikan dan perluasan lahan pertanian, dan (5) perencanaan pembangunan pertanian secara nasional. Meskipun keberadaan kelembagaan koperasi pertanian merupakan salah satu syarat pelancar, namun apabila syarat pelancar ini tidak terpenuhi, maka dalam proses pembangunan pertanian akan berjalan lambat.

Membangun kelembagaan koperasi pertanian yang kuat sangat diperlukan agar tercipta iklim yang mampu mendorong terpenuhinya syarat mutlak dan syarat pelancar bagi pembangunan koperasi pertanian.

C. Arah Pembangunan Koperasi Pertanian

Dalam pembangunan nasional, koperasi secara umum dan juga koperasi pertanian diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai penggerak perekonomian nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Berbagai kegiatan yang terkait dengan arah pembangunan koperasi adalah melalui: (Bappenas, 2017)

1. Peningkatan kontribusi ekspor koperasi dalam ekspor nasional
2. Peningkatan partisipasi koperasi dalam pembangunan infrastruktur Nasional
3. Peningkatan peran koperasi dalam keuangan inklusif
4. Peningkatan peran koperasi dalam rantai produksi global
5. Peningkatan sinergi koperasi dengan BUM Desa

Upaya-upaya perkuatan koperasi dapat dilakukan melalui proses: edukasi, kepemimpinan, kewirausahaan, inovasi, kolaborasi dan kepedulian sosial. Edukasi pendidikan anggota koperasi akan menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan koperasi. Melalui proses pendidikan ini pula setiap anggota belajar dan diberi kesempatan menjadi pengurus dan pengawas yang merupakan inkubasi bagi calon-calon pemimpin organisasi. Selain itu, pengurus dan anggota koperasi belajar mengembangkan kewirausahaannya melalui pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota atas dasar profesionalisme, akuntabilitas, dan orientasi usaha yang dikembangkannya.

Guna menguatkan kegiatan usahanya, koperasi memiliki kapasitas untuk berkreasi dengan menggunakan kontribusi pemikiran dan tenaga anggota dalam merumuskan pengembangan inovasi usahanya agar mampu berdaya saing dengan perkembangan lingkungan yang semakin dinamis. Demikian pula dalam mengembangkan jejaring kerjasamanya, koperasi dapat berkolaborasi menggalakkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lain baik untuk menguatkan pendidikan, usaha maupun permodalan koperasi agar mencapai skala ekonomi yang efisien.

Koperasi memiliki kapasitas untuk menjalankan tanggungjawab sosial dalam mendukung aktivitas anggota, dan perbaikan kondisi lingkungan masyarakat sekitar melalui kegiatan kepedulian sosialnya. Berbagai bentuk kontribusi sosial koperasi kepada masyarakat di antaranya adalah dengan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi ekonomi berupa pajak kepada pemerintah.

Konsep Rantai Nilai (*Value Chain*)

A. Kerangka Teoritis

Teori rantai nilai atau *value chain* produk pertanian (agribisnis) tidak dapat dipisahkan dari *grand theory* produksi yang berhubungan dengan teori biaya, nilai tambah dan margin pemasaran. Teori produksi mempelajari bagaimana menggunakan berbagai kombinasi input produksi untuk menghasilkan *output* yang optimal. Dengan demikian fungsi produksi merupakan hubungan antara berbagai penggunaan input produksi dengan tingkat output yang dihasilkannya. Dalam fungsi produksi berlaku hukum tambahan hasil yang menurun sebagai akibat penambahan setiap satu satuan input produksi, dan dikenal sebagai *The Law of Diminishing Marginal Return*.

Teori biaya menjelaskan tentang fungsi biaya yang menunjukkan hubungan antara biaya dan jumlah *output* atau produk yang dihasilkan melalui proses transformasi input menjadi output.

Berbagai faktor yang menentukan besarnya biaya produksi adalah; kondisi fisik proses produksi, harga faktor produksi, dan efisiensi kerja perusahaan dalam memproduksi.

Adapun nilai tambah suatu produk merupakan suatu konsekuensi akibat pengembangan nilai yang terjadi karena adanya input yang diperlakukan tertentu pada suatu komoditas seperti adanya perubahan bentuk, tempat dan waktu. Terdapat dua cara dalam menghitung nilai tambah, yaitu nilai untuk pengolahan dan nilai untuk pemasaran. Nilai untuk pengolahan terdiri atas dua faktor yaitu faktor teknis dan faktor harga. Faktor teknis seperti kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan jumlah tenaga kerja, sedangkan faktor harga adalah harga-harga input produksi seperti: harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya modal, dan harga output. Sedangkan margin pemasaran merupakan tambahan biaya dan keuntungan sebagai konsekuensi proses distribusi produk sampai ke tangan konsumen.

Secara keseluruhan, rantai nilai (*value chain*) mengacu pada keseluruhan aktivitas yang diperlukan untuk memindahkan barang dan atau jasa (produk) mulai dari fase konsep sampai, masuk ke tahap produksi, sampai ke tangan konsumen akhir, dan akhirnya dibuang setelah selesai dikonsumsi (Kaplinsky dan Moris, 2001). Selanjutnya, sebuah rantai nilai muncul ketika seluruh pelaku dalam rantai bekerja dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai produk akhir. Lebih sempit lagi, rantai nilai merupakan seluruh aktivitas yang dilaksanakan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa, yang meliputi tahap konsep dan desain, pengolahan, pemasaran dan distribusi, kinerja pelayanan purna jual dan lain sebagainya. Setiap aktivitas menambahkan nilai ke dalam produk akhir, sehingga seluruh aktivitas membentuk sebuah rantai yang menghubungkan produsen dengan konsumen.

Lebih spesifik dalam sektor pertanian, Amanor-Boadu (2005) menyatakan bahwa nilai tambah dalam pertanian terbentuk ketika terjadi perubahan dalam bentuk fisik atau bentuk produk pertanian, atau adopsi metode produksi atau proses penanganan yang bertujuan untuk meningkatkan basis konsumen bagi produk tersebut serta mendapatkan porsi yang lebih besar dari pengeluaran pembelanjaan konsumen yang tumbuh untuk produsen. Berdasarkan definisi tersebut, inisiatif nilai tambah bisnis pada suatu rantai pasokan yang ada terjadi sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha industri hilir pada suatu rantai pasokan. Ukuran imbalan tersebut secara langsung dan proporsional ditujukan untuk kepuasan konsumen. Imbalan tersebut berbentuk harga yang tinggi, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan akses pasar sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha.

Rantai nilai sebagai suatu cara pandang, menempatkan kegiatan bisnis sebagai rantai aktivitas yang mengubah *input* menjadi *output* sehingga memberikan nilai tambah kepada konsumen atau pelanggan produk tersebut. Terdapat tiga sumber dasar bagi pelanggan yang mendapatkan nilai tambah, yaitu dari aktivitas yang membedakan produk, aktivitas yang menurunkan biaya produk, dan aktivitas yang dapat segera memenuhi kebutuhan pelanggan (Pearce dan Robinson, 2008). Analisis rantai nilai (*value chain analysis- VCA*) berupaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut. VCA mengambil sudut pandang proses dalam suatu rangkaian bisnis yang diawali dengan *input* yang diterima suatu perusahaan, proses mengolah *input* dan diakhiri dengan penerimaan produk (barang atau jasa) oleh konsumen atau pelanggan. Dalam VCA akan

berusaha untuk melihat biaya lintas rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam bisnis untuk menentukan di mana terdapat keunggulan biaya rendah atau kelemahan biaya. Bagaimana setiap aktivitas yang terjadi antara pembelian *input* dan layanan purna jual dapat membedakan produk atau barang dan jasa perusahaan tersebut.

B. Pembangunan Koperasi Pertanian Berbasis Rantai Nilai Agribisnis

Pembangunan koperasi pertanian berkaitan erat dengan ketersediaan pemenuhan kebutuhan pangan baik secara kuantitas maupun kualitas dengan berkelanjutan. Berbagai istilah yang berkaitan dengan pangan di antaranya menyangkut swasembada pangan, kemandirian pangan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.

Swasembada Pangan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri

Kemandirian Pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan tanpa adanya ketergantungan dari pihak luar dan mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi dunia.

Kedaulatan Pangan adalah hak setiap orang, masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengontrol aneka sumberdaya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing (Hines 2005 dalam Khudori 2008)

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan (UU 18/2012).

Dalam konsepsi ketahanan pangan bagi rumah tangga perseorangan memiliki tiga komponen, yaitu menyangkut (1) kecukupan ketersediaan pangan, (2) tercukupinya kebutuhan konsumsi, dan (3) distribusi pangan yang merata.

Sejalan dengan konsepsi ekonomi, maka secara umum upaya penyediaan dan pemenuhan pangan melibatkan kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam hal ini produksi pangan dan stabilitas harga pangan menopang kinerja perekonomian nasional melalui:

1. Pengendalian inflasi;
2. Pertumbuhan PDB (sektor pertanian)
3. Stabilitas nasional
4. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat mencakup:

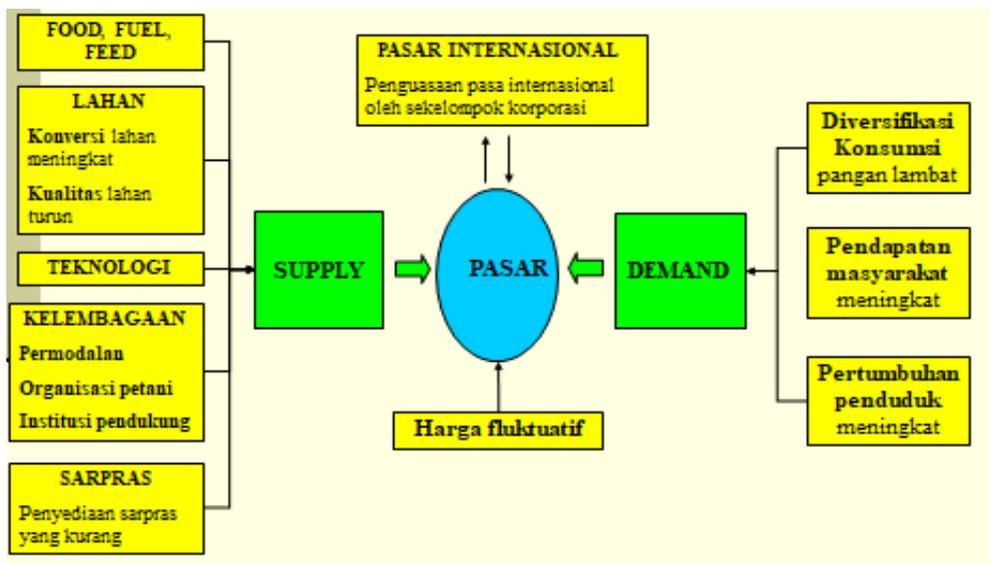
1. Tingkat konsumsi energi dan protein;
2. Prevalensi kekurangan gizi menurun.

Berbagai program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan pemerintah pada umumnya untuk :

Book Chapter

1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melakukan pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.
2. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur pedesaan yang mendukung sistem distribusi pangan untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.
3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (*looser*).
4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan
5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan, dan pengembangan system antisipasi dini terhadap kerawanan pangan.

Berbagai faktor yang memengaruhi upaya mewujudkan ketahanan pangan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Kendala dan Tantangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
Sumber: Nuhfil Hanani-Brawijaya

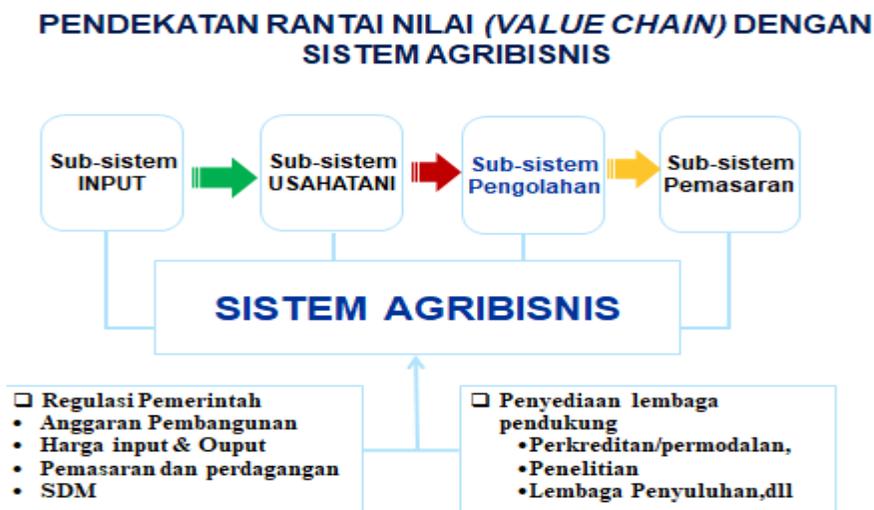
Faktor kunci yang menjadi prasyarat dalam pengembangan rantai nilai agribisnis terdiri atas:

1. Keterlibatan para pelaku rantai nilai, yakni produsen, kelompok produsen atau koperasi, jasa logistik pedesaan, supplier (pemasok), industri pengolahan produk

pertanian seperti penggilingan beras, dan pelaku pasar terstruktur (ekspor, ritel modern, jasa pangan dan industri pengolahan).

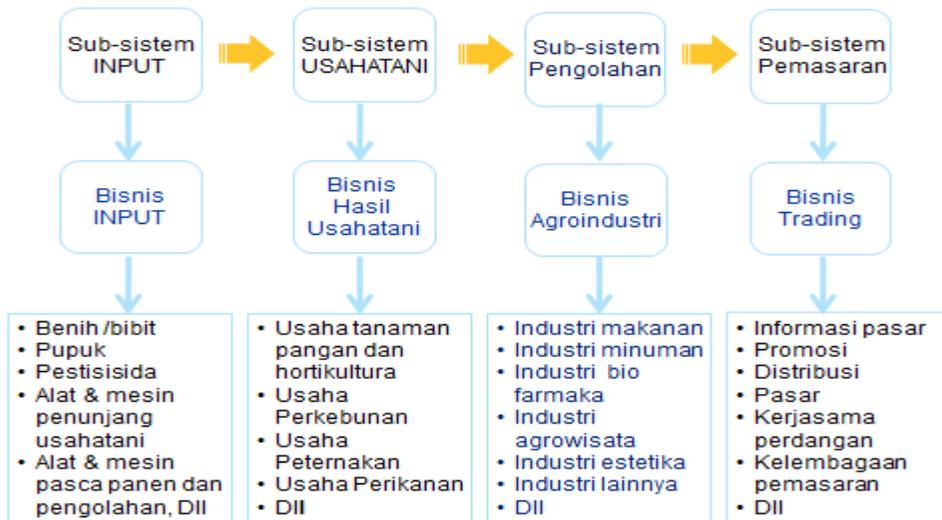
2. Pasar terstruktur atau pasar modern secara khusus menjadi perhatian utama dalam pengembangan pembiayaan rantai nilai agribisnis.
3. Penerapan sistem produksi hibrida yang memiliki titik penetrasi pesanan atau titik pemisah pesanan dan produksi/pasokan (*customer order decoupling point*). Pihak yang melakukan keputusan sistem produksi hibrida adalah jasa logistik pedesaan, supplier (pemasok) dan industri pengolahan seperti penggilingan beras.
4. Penerapan manajemen rantai nilai yang terdiri atas manajemen proses bisnis dan risiko yang dilakukan oleh pelaku sepanjang rantai nilai.
5. Penerapan teknologi yang meliputi teknologi lunak (*soft technology*) dan teknologi keras (*hard technology*). Teknologi lunak meliputi standar operasional prosedur (SOP) budidaya pertanian yang benar (*Good Agricultural Practices*), SOP penanganan pasca panen (*Good Handling Practices*) dan distribusi (*Good Distribution Practices*) serta SOP pengolahan hasil (*Good Manufacture Practices*). Sedangkan teknologi keras meliputi teknologi naungan (*protected agriculture*) seperti *mobile rainshelter* dan *shading net* serta teknologi sistem irigasi *sprinkler*.
6. Layanan pendampingan bagi para pelaku sepanjang rantai nilai yang dapat dilakukan oleh koperasi, pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. Para pendamping memberikan layanan berupa peningkatan kapasitas keterampilan, teknologi dan akses pasar bagi para petani.
7. Ketersediaan layanan pembiayaan pedesaan akan mempermudah akses pembiayaan bagi para pelaku rantai nilai pertanian di pedesaan.

Berikut disajikan gambar pendekatan rantai nilai sistem agribisnis :



Gambar 3. Pendekatan Rantai Nilai (Value Chain) dengan Sistem Agribisnis
Sumber: Departemen Agribisnis FEM, IPB. Bogor.2004.

Secara lebih terperinci berbagai aktivitas bisnis pertanian yang dapat dikembangkan oleh koperasi yang mengintegrasikan berbagai kegiatan bisnis *input*, bisnis hasil pertanian, bisnis pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan bisnis bidang pemasaran hasil dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Rantai Nilai (Value Chain) Agribisnis

Berbagai program pengembangan agribisnis untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis dengan memerhatikan rantai pasok (*supply chain*) maupun rantai nilai (*value chain*) agribisnis yang dapat dikembangkan melalui pembangunan koperasi pertanian yang mencakup usaha agribisnis hulu, *on farm*, hilir dan usaha jasa pendukungnya adalah:

1. Pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan agroindustri di perdesaan;
3. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani, serta infrastruktur perdesaan lainnya.
4. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan;
5. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil;
6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan;
7. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antar lain melalui pengembangan dan penguatan koperasi

pertanian, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.

Upaya membangun koperasi pertanian berbasis rantai nilai agribisnis menempatkan pengelolaan koperasi dapat mengintegrasikan kegiatan usahanya dengan memerhatikan sub sistem dari hulu sampai hilir, yaitu dari proses bisnis *input* produksi, mengelola usaha tani oleh anggota, mengelola usaha pengolahan hasil produksi, dan mengelola pemasaran produknya sehingga mampu menciptakan nilai tambah dari setiap rantai pasok (*supply chain*) yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan rantai nilai (*value chain*) produknya. Dengan demikian pembangunan koperasi pertanian dapat memaksimalkan berbagai rantai nilai pada setiap subsistem agribisnis sehingga peran koperasi dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dapat tercapai dan sekaligus koperasi mampu bersaing dengan berbagai lembaga ekonomi lainnya.

Gambar 5. menjelaskan bagaimana koperasi pertanian dapat merumuskan strategi untuk mengimplementasikan rantai nilai agribisnis dengan memerhatikan berbagai faktor kunci, faktor pendukung dan faktor-faktor lainnya disajikan sebagai berikut:



Gambar 5. Strategi Pembangunan Koperasi Pertanian Komoditi Unggulan Berbasis Rantai Nilai (*Value Chain*) Agribisnis

Penutup

Pembangunan koperasi pertanian berbasis rantai nilai agribisnis mengintegrasikan keterjaminan ketahanan dan kemandirian pangan melalui keterjaminan rantai pasok (*supply chain*) dengan rantai nilai (*value chain*) sehingga distribusi produk pertanian dari produsen (petani) sampai konsumen mampu memberikan nilai tambah yang lebih baik

Book Chapter

bagi setiap pelaku bisnis pertanian baik *off-farm* maupun pebisnis *on-farm* dan konsumen. Ke depan, dengan penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pengelolaan rantai nilai agribisnis yang didukung oleh pengembangan berbagai aplikasi teknologi berbasis digital, Indonesia akan mampu mencapai kesinambungan swasembada pangan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia . 2014. *Skema Pembiayaan Pertanian dengan Pendekatan Konsep Rantai Nilai (Value Chain Financing)*. Jakarta
- Bappenas. 2017. *Koperasi Dalam Arah Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Erif Kemal Syarif dan Bagus Harianto. 2011. *Buku Pintar Beternak dan Bisnis Sapi Perah*. PT AgroMedia Pustaka. Bogor.
- Indrajit, R.E. dan R. Djokopranoto. 2002. *Konsep Manajemen Supply Chain: Cara Baru Memandang Mata Rantai Penyediaan Barang*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Nuhfil Hanani. <http://ww.lecture.brawijaya.ac.id/nuhfil>
- Porter, M.E. 1985. *Competitive Advantage: Creating a Sustaining Superior Performance*. New York: The Free Press.
- Ramudi, Ariffin.2016.*Kinerja Koperasi Berdasarkan Indikator Jatidirinya*. Bandung. Ikopin.
- Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Dasar Perkoperasian no.25 Tahun 1992, Jakarta.
- Saragih, B. 1998. *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi*. Berbasis Pertanian. Jakarta: Yayasan Mulia Persada Indonesia.
- Soekartawi . 1989. *Manajemen Pemasaran Hasil-Hasil Pertanian*. Rajawali Pers. Jakarta
- Supli Effendi.2009. *Teknologi Pengolahan dan pengawetan Pangan*. Alfabeta. Bandung
- Suyitno. 1989. *Rekayasa Pangan*. PAU UGM. Yogyakarta
- Tim Penyusun Kamus PS. 2013. Kamus Pertanian Umum. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Timmer, C. Peter 2015. ‘*The Dynamics of Agricultural Development and Food Security in Southeast Asia: Historical Continuity and Rapid Change*’. In *Handbook of Southeast Asian Economics*, edited by Ian Coxhead, 89–113. Abingdon: Routledge.
- World Bank. 2007. *Horticultural Producers and Supermarket Development in Indonesia*. Report 38543-ID. Jakarta: World Bank.

World Bank. 2015. *World Development Indicators Database*. Updated 12 November 2015. <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/>.